

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

Penelitian ini membahas tentang Evaluasi Kebijakan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) Upaya Meningkatkan Kemandirian Sosial Ekonomi di Provinsi DKI Jakarta. Sehingga dalam bab ini akan menjelaskan mengenai deskripsi kondisi wilayah di Provinsi DKI Jakarta, dan juga mendeskripsikan dari instansi yang terkait dengan perolehan data penelitian yang akan dilakukan seperti data mengenai wilayah yang telah mengimplementasikan program PENA yaitu di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pertama dalam bab ini akan menjelaskan mengenai deskripsi umum Jakarta Pusat sebagai objek penelitian ini. Kedua akan menjelaskan tentang gambaran umum Kementerian Sosial RI, seperti Tugas dan Fungsi, visi dan misi, dan struktur organisasi sebagai tempat perolehan data dan informasi mengenai kebijakan program PENA.

3.1 Deskripsi Umum Provinsi DKI Jakarta

3.1.1 Sejarah

Sebelum memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1959, Jakarta dulunya mewakili komponen dari Provinsi Jawa Barat. Pada tahun tersebut, kedudukan Kota Jakarta diubah dari kotapraja dengan wali kota menjadi daerah tingkat satu (Dati I) yang dipimpin oleh seorang gubernur. Dr. Soemarno Sosroatmodjo, seorang dokter yang bertugas di bidang militer, menjabat sebagai gubernur pertama. Penunjukan Gubernur DKI secara langsung dilakukan oleh Presiden Sukarno.

Setelah statusnya diubah menjadi Daerah Khusus Ibukota (DKI) pada tahun 1961, Sumarno tetap memegang jabatan sebagai gubernur. Sejak menjadi ibu kota, jumlah penduduknya meningkat pesat, melampaui dua kali lipat dalam waktu lima tahun. Banyak permukiman kelas menengah baru bermunculan sebagai hasil dari perkembangan ini.

Pondok Indah, sebagai pusat permukiman besar pertama yang dikembangkan secara swasta (oleh PT Pembangunan Jaya), muncul pada akhir dekade 1970-an di daerah Jakarta Selatan. Pada awal 1970-an, Gubernur Ali Sadikin melakukan upaya untuk mengendalikan pertumbuhan

penduduk dengan mendeklarasikan Jakarta sebagai "kota tertutup" untuk mereka yang baru masuk. Namun, strategi ini tidak berhasil dan ditinggalkan pada masa kepemimpinan gubernur selanjutnya. Jakarta masih menghadapi masalah seperti banjir, kemacetan, dan kurangnya sarana transportasi umum yang memadai, yang sebagian besar disebabkan oleh kepadatan penduduk (Nasrullah et al., 2021).

3.1.2 Makna Logo Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta

Jakarta Pusat memiliki warisan sejarah yang kaya dan menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Logo DKI Jakarta mempunyai makna yang mendalam Sebagai kota yang menjadi saksi proklamasi dan perjuangan, Jakarta memiliki peran ganda sebagai ibu kota negara dan salah satu daerah khusus di Indonesia. Desain logo DKI Jakarta terdiri dari perisai dengan variasi segi lima, yang merupakan representasi dari lima sila Pancasila.

Makna Motto

Motto "Jaya Raya" memiliki asal-usul dari dua kata Sanskerta, yakni "Jaya" yang berarti "Jaya dan Besar," dan "Raya" yang bermakna "Perjuangan." Motto ini mencerminkan semangat yang membara dari penduduk dan wilayah DKI Jakarta, yang menjadi Ibu Kota Negara dan juga Kota Perjuangan.

Simbolis Warna

Deskripsi warna-warna pada lambang DKI Jakarta dan maknanya adalah sebagai berikut:

Kuning Keemasan: Melambangkan kemuliaan Pancasila, dan digunakan pada tepi perisai.

Merah: Mewakili keberanian dan kepahlawanan, digunakan dalam sloka Jaya Raya.

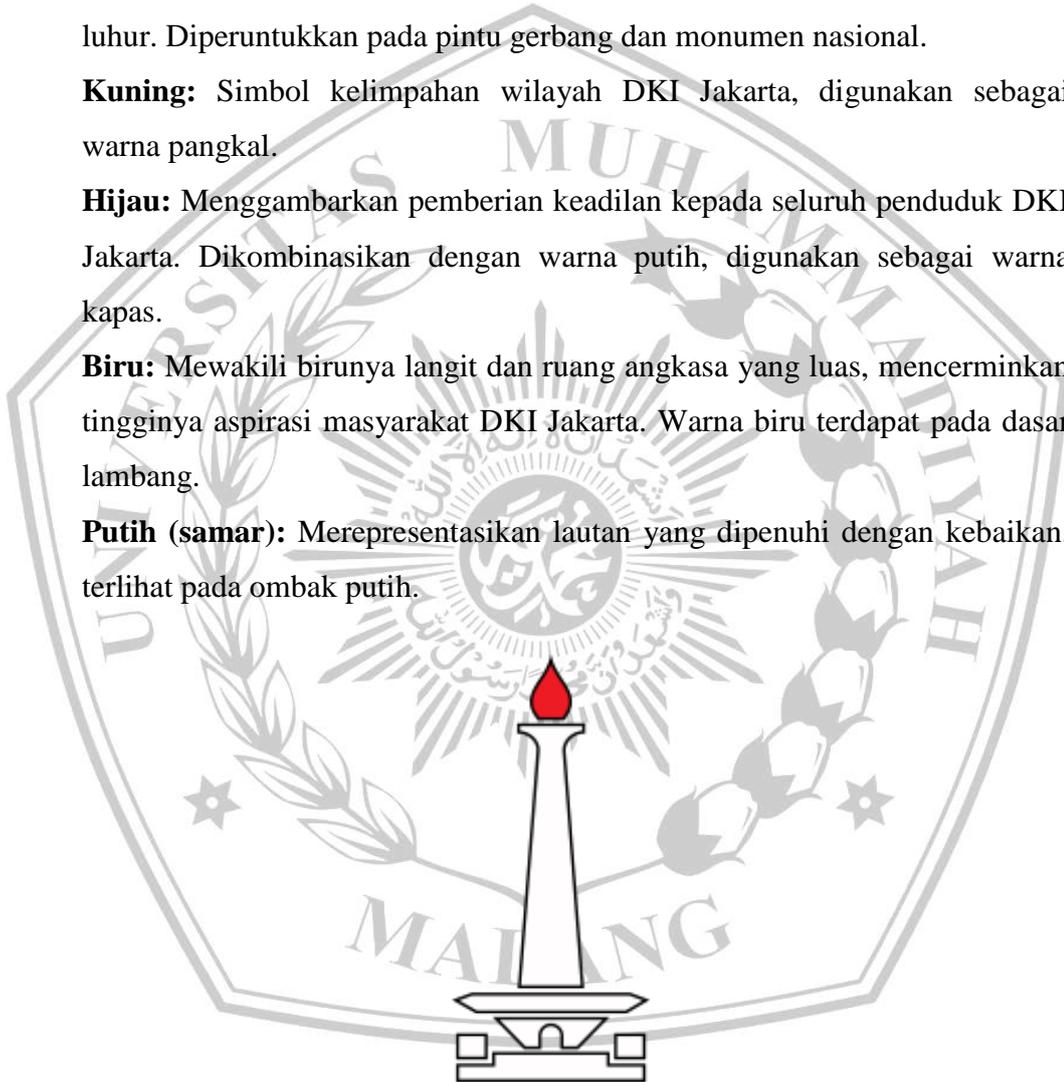
Putih: Merepresentasikan kebersihan spiritual, keangungan, dan kreasi yang luhur. Diperuntukkan pada pintu gerbang dan monumen nasional.

Kuning: Simbol kelimpahan wilayah DKI Jakarta, digunakan sebagai warna pangkal.

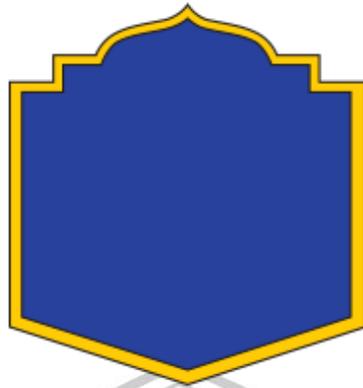
Hijau: Menggambarkan pemberian keadilan kepada seluruh penduduk DKI Jakarta. Dikombinasikan dengan warna putih, digunakan sebagai warna kapas.

Biru: Mewakili birunya langit dan ruang angkasa yang luas, mencerminkan tingginya aspirasi masyarakat DKI Jakarta. Warna biru terdapat pada dasar lambang.

Putih (samar): Merepresentasikan lautan yang dipenuhi dengan kebaikan, terlihat pada ombak putih.



Tugu Nasional (Monas): Mewakili kemegahan, semangat perjuangan, dan kreativitas wilayah DKI Jakarta sebagai kota revolusi. Monas, sebagai ikon nasional, menjadi simbol perjuangan dan kebanggaan, mencerminkan semangat revolusi yang membebaskan bangsa Indonesia.



Pintu Gerbang: Merepresentasikan kota dan karakteristik unik Jakarta sebagai pintu masuk dan keluar untuk berbagai kegiatan nasional dan hubungan internasional.



Padi dan Kapas: pada lambang DKI Jakarta mewakili keberlimpahan dalam wilayah dan masyarakat Jakarta. Bentuk ini juga diambil dari simbol Garuda Pancasila., yang menekankan pada nilai-nilai kemakmuran, keberlimpahan, dan kesejahteraan. Padi dan kapas sebagai lambang pertanian tradisional menggambarkan harapan akan kemakmuran dan kesejahteraan di wilayah tersebut.



Tali Emas: pada lambang DKI Jakarta melambangkan persatuan dan kesatuan masyarakat Jakarta. Simbol ini mencerminkan realitas masyarakat yang heterogen dan toleran di Indonesia. Tali emas menjadi representasi

kuat akan semangat persatuan dalam keberagaman, menegaskan pentingnya kerjasama dan harmoni di tengah-tengah masyarakat yang beragam budaya dan latar belakang.

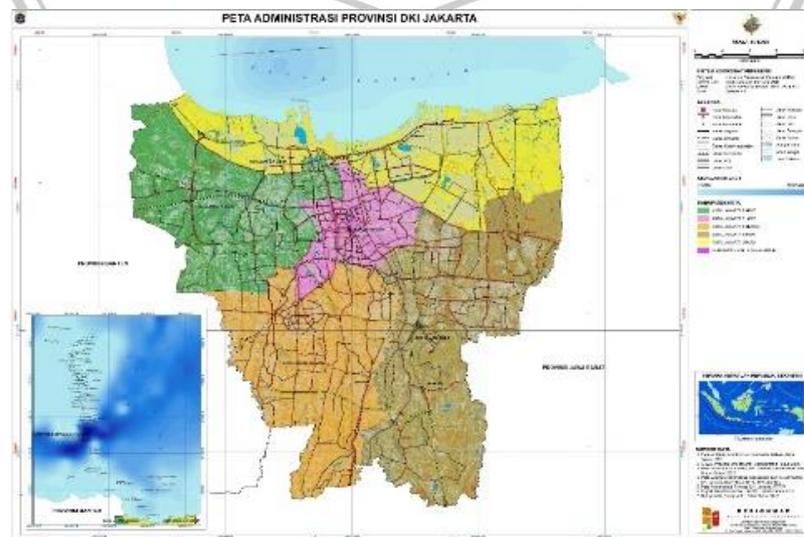


Ombak laut: pada lambang DKI Jakarta mewakili wilayah bahari di pesisir Jakarta dan mencerminkan sifat kota pelabuhan serta Indonesia sebagai negara kepulauan. Simbol ombak laut menyoroti pentingnya keterkaitan Jakarta dengan lautan dan peran strategisnya sebagai pusat maritim, yang memiliki dampak besar pada sektor ekonomi, perdagangan, dan konektivitas antar pulau.

3.1.3 Kondisi Umum Geografis

Situs geografis Provinsi DKI Jakarta berada di garis lintang $6^{\circ}12'$ Selatan dan bujur timur $106^{\circ}48'$. Secara geografis, luas total DKI Jakarta mencapai 7.639,83 km², beserta 662,33 km² merupakan daratan, yang melibatkan salah satu dari 110 pulau terbesar di Kepulauan Seribu, sementara sisanya, sekitar 6.977,5 km², adalah wilayah lautannya. DKI Jakarta sering menghadapi masalah genangan air yang bersumber dari tingginya curah hujan atau pasang laut, menjadi tantangan geografis yang perlu diatasi. Ini karena DKI Jakarta berada di bawah permukaan laut sebagai wilayah pesisir yang termasuk dalam jangkauan air laut.

Gambar 3.1 Peta Administrasi DKI Jakarta



Sumber: Peta Tematik Indonesia

Pembagian wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan demi keperluan untuk menaikkan pelayanan terhadap masyarakat. dan meningkatkan efisiensi. DKI Jakarta terdiri dari 5 (lima) kota administratif, yakni Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur, serta 1 (satu) kabupaten administratif, yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu. Lebih lanjut, wilayah tersebut dibagi menjadi kecamatan, dengan total 44 kecamatan dan 267 kelurahan, memungkinkan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih terfokus dan sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah.

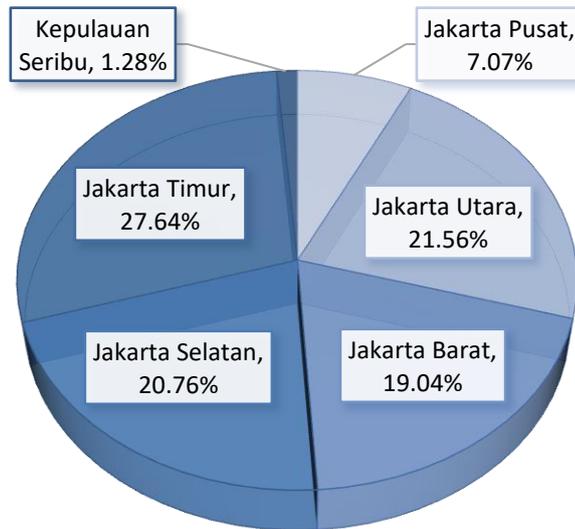
Tabel 3.1 Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Kota/Kab Administrasi	Luas Area (km ²)	Jumlah			
		Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
Jakarta Pusat	48,13	8	44	393	4.710
Jakarta Utara	146,66	6	31	448	5.239
Jakarta Barat	129,54	8	56	584	6.495
Jakarta Selatan	141,27	10	65	582	6.164
Jakarta Timur	188,08	10	65	707	7.952
Kepulauan Seribu	8,70	2	6	24	127
Jumlah	662,33	44	267	2.738	30.687

Sumber: RPJMD DKI Jakarta Tahun 2018-2022

Sesuai dengan informasi yang terdapat pada tabel 3.1 diatas, jelas bahwa wilayah administratif dengan luas terbesar adalah Jakarta Timur, mencapai 27,65% dari total luas wilayah DKI Jakarta. Sementara itu, wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki luas terkecil, hanya sebesar 1,28%, menunjukkan cakupan yang paling terbatas di antara wilayah administratif lainnya.

Gambar 3.2 Penataan Kawasan Provinsi DKI Jakarta



Sumber: diolah oleh peneliti

3.1.4 Kondisi Umum Demografi

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), selain berfungsi sebagai obyek dan subyek pembangunan, penduduk juga dapat berfungsi sebagai modal dasar untuk pembangunan dan juga dapat berfungsi sebagai hambatan atau penghalang untuk mencapai tujuan pembangunan. Ini akan terjadi jika pertumbuhan populasi tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan pendidikan dan kesehatan. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, penting bagi pemerintah untuk terus menerapkan kebijakan tentang masalah kependudukan. Kebijakan ini dapat melibatkan upaya dalam bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, serta perencanaan keluarga untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan memastikan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan kependudukan, pemerintah dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh masyarakat.

Tabel 3.2 Tingkat Perkembangan Populasi, Pemetaan Persentase Populasi dan Densitas Penduduk Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota 2019-2021

Kab/Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk								
	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun			Persentase Penduduk %			Kepadatan Penduduk per km ²		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Kep Seribu	1.79	2.69	2.24	0.23	0.26	0.27	2387.00	2461.00	2774.00
Jakarta Selatan	1.18	0.75	0.40	21.44	21.08	21.05	14675.00	14664.00	14475.00
Jakarta Timur	1.09	1.17	0.80	27.80	28.76	28.81	16080.00	14390.00	16729.00
Jakarta Pusat	0.34	1.53	1.14	8.75	10.01	10.05	17719.00	18603.00	20360.00
Jakarta Barat	1.60	0.63	0.29	24.61	23.05	23.00	20813.00	17701.00	19608.00
Jakarta Utara	1.22	0.76	0.41	17.17	16.84	16.82	12950.00	11272.00	12749.00
DKI Jakarta	1.19	0.92	0.57	100.00	100.00	100.00	15900.00	14555.00	15978.00

Sumber : Badan Pusat Statistik DKI Jakarta

Tabel 3.3 Jumlah Populasi Provinsi DKI Jakarta Menurut Klasifikasi Usia Produktif Tahun 2020-2022

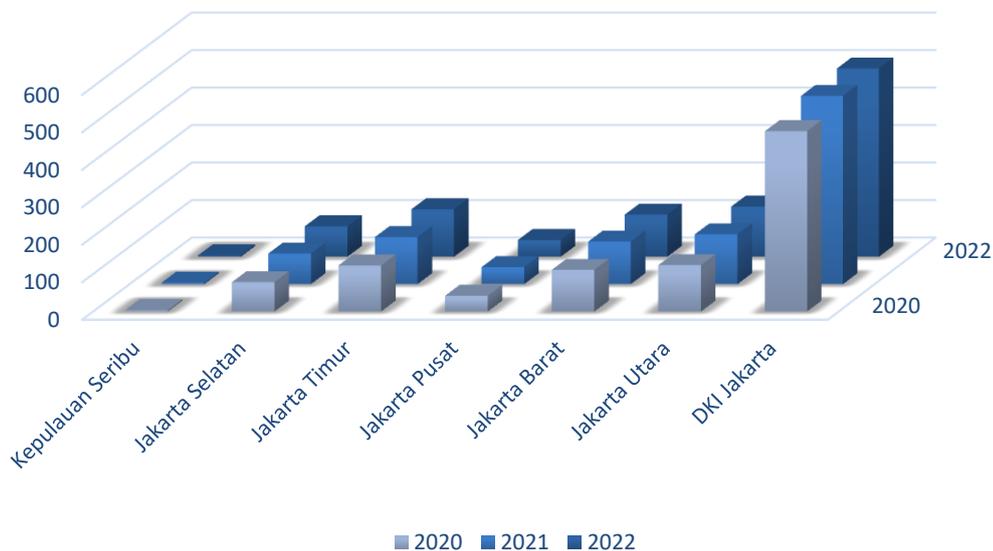
Kelompok Umur	Jumlah		
	2020	2021	2022
15-19	825 828	834 848	830 835
20-24	818 069	854 382	862 490
25-29	835 638	859 215	854 980
30-34	861 109	883 303	856 147
35-39	974 357	873 639	865 357
40-44	913 386	856 926	847 114
45-49	799 344	787 945	802 044
50-54	670 571	680 391	705 062
55-59	526 403	560 584	587 846
60-64	377 403	422 277	587 846

Sumber : Badan Pusat Statistik DKI Jakarta

b. Kemiskinan

Krisis kesehatan global atau virus corona, telah mengguncang dunia sejak akhir 2019. Pandemi ini menyebar di banyak tempat secara global. Efek dan dampak dari pandemi COVID-19 telah menyebabkan lonjakan kemiskinan yang cepat. Meskipun angka kemiskinan di Jakarta menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2000, dari 4,96 persen menjadi 3,47 persen pada tahun 2019, situasinya berubah sejak wabah COVID-19 dimulai pada Maret 2020. Data dari Susenas Maret 2021 memperlihatkan bahwa persentase populasi orang tidak mampu atau miskin di DKI Jakarta mencapai 4,78 persen pada bulan Maret 2021, melibatkan sekitar 501,92 ribu orang. Lonjakan ini mencerminkan dampak ekonomi negatif yang signifikan yang diakibatkan oleh pandemi. Ini meningkat tipis sebesar 0,09 poin, atau meningkat sebesar 5,08 ribu orang, dibandingkan dengan 4,76 persen pada bulan Maret 2020, atau 496,84 ribu orang (Jakarta, 2022).

Gambar 3.3 Jumlah Populasi Miskin (Ribu Jiwa) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta



Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (diolah oleh peneliti)

3.1.5 Wilayah Administrasi

Provinsi DKI Jakarta mempunyai luas daratan sekitar 661,52 km² dan luas laut mencapai 6.977,5 km². Wilayah ini juga mencakup 110 pulau

tambahan yang terdispersi di Kepulauan Seribu. Secara rinci, luas daratan untuk setiap wilayah administratif di Jakarta adalah sebagai berikut: Jakarta Pusat: 47,90 km² Jakarta Utara: 154,01 km² Jakarta Barat: 126,15 km² Jakarta Selatan: 145,73 km² Jakarta Timur: 145,73 km² Dengan demikian, penjelasan ini memberikan gambaran tentang sebaran luas daratan di setiap wilayah administratif DKI Jakarta. DKI Jakarta adalah daerah otonom pada tingkat provinsi dan berfungsi sebagai ibu kota negara. Selain itu, di bawahnya tidak ada kabupaten atau kota, tetapi kabupaten dan kota administrasi. Autonomi adalah apa yang membedakan kabupaten atau kota dari kota administratif. Dalam struktur administratif, Kota Administrasi Jakarta Timur adalah kabupaten/kota administrasi dengan jumlah populasi terbanyak, mencapai 2.843.816 jiwa (27,94% dari total penduduk DKI Jakarta). Sementara itu, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan kabupaten administrasi dengan jumlah populasi paling sedikit, yaitu 23.340 jiwa pada tahun 2015. Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki luas kawasan terbesar, mencapai 182,70 km², sementara Kota Administrasi Jakarta Pusat mempunyai luas wilayah terkecil, yaitu 52,38 km². Struktur demografi dan geografi ini memberikan gambaran tentang variasi antara wilayah administratif di DKI Jakarta.

Tabel 3.4 Jumlah Populasi Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa)

Kab/Kota	Jumlah Penduduk		
	2020	2021	2022
Kepulauan Seribu	27.749	28.240	28.925
Jakarta Selatan	2.226.812	2.233.855	2 244 623
Jakarta Timur	3.037.139	3.056.300	3 083 883
Jakarta Pusat	1.056.896	1.066.460	1 079 995
Jakarta Barat	2.434.511	2.440.073	2 448 975
Jakarta Utara	1.778.981	1.784.753	1 793 550
DKI Jakarta	10.562.088	10.609.681	10 679 951

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

3.1.6 Landasan Visi & Misi Pemerintah Kota Jakarta Administrasi Pusat

Penelitian ini membahas mengenai evaluasi kebijakan program Pahlawan Ekonomi Nusantara, dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada Kota Administasi Jakarta Pusat sebagai wilayah penelitiannya, oleh

sebab itu visi dan misi tersebut akan menjelaskan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Visi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat:

Menggapai visi "Mewujudkan Kota Administrasi Jakarta Pusat yang berfokus pada fasilitas publik, menuju kota dengan layanan canggih yang berlandaskan budaya".

Misi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat:

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik di wilayah Administrasi, beberapa langkah strategis telah diambil. Pertama-tama, fokus diberikan pada memperbaiki sinkronisasi dan pengendalian layanan publik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keterpaduan yang lebih baik antara berbagai layanan yang disediakan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang lebih efisien dan efektif. Selain itu, langkah-langkah konkret telah diambil untuk meningkatkan status kota sebagai pusat jasa yang canggih.

Upaya ini melibatkan peningkatan sinkronisasi dan regulasi yang mendukung perkembangan teknologi dan inovasi. Selain itu, fokus diberikan pada pengembangan budaya yang kaya, menciptakan lingkungan yang mendorong pertumbuhan seni, warisan, dan kearifan lokal. Dalam mengoptimalkan kawasan kerja di Kota Administrasi, perhatian khusus diberikan pada peningkatan kapabilitas pegawai. Program pelatihan dan pengembangan diterapkan untuk memastikan bahwa pegawai memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Selain itu, upaya dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan hukum pegawai, menciptakan lingkungan kerja yang etis dan berintegritas. Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama. Sinkronisasi dan pengaturan yang lebih baik dalam hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan yang lebih efektif kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan. Program pemberdayaan masyarakat diperkuat untuk meningkatkan kemandirian dan partisipasi aktif warga dalam pembangunan komunitas.

Dalam ranah ekonomi, langkah-langkah diarahkan pada perbaikan sinkronisasi dan pengaturan ekonomi kota. Kontrol keuangan dan aset dijalankan dengan ketat, memastikan pengelolaan sumber daya yang efisien dan transparan. Ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan bagi pertumbuhan yang berkesinambungan.

3.2 Gambaran Umum Kementerian Sosial Republik Indonesia

3.2.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015, Kementerian Sosial Bertugas untuk melaksanakan kegiatan terkait rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin. Tugas ini diberikan dengan maksud melaksanakan pemerintahan negara dan mencapai inklusivitas sosial.

Dalam lingkup tugas yang luas, Kementerian Sosial telah merumuskan serangkaian inisiatif strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertama-tama, fokus diberikan pada penyusunan, ketetapan, dan implementasi kebijakan di berbagai sektor, termasuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin. Kementerian juga aktif menetapkan standar dan mengumpulkan data terkait fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan akurat terkait kondisi sosial.

Standar rehabilitasi sosial ditetapkan untuk memastikan layanan rehabilitasi efektif yang berfokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial. Selain itu, upaya koordinasi, pembinaan, dan dukungan administrasi dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa semua elemen organisasi di bawah naungan Kementerian Sosial beroperasi dengan efisien dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pengelolaan barang milik dan kekayaan negara menjadi tanggung jawab kementerian, dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas.

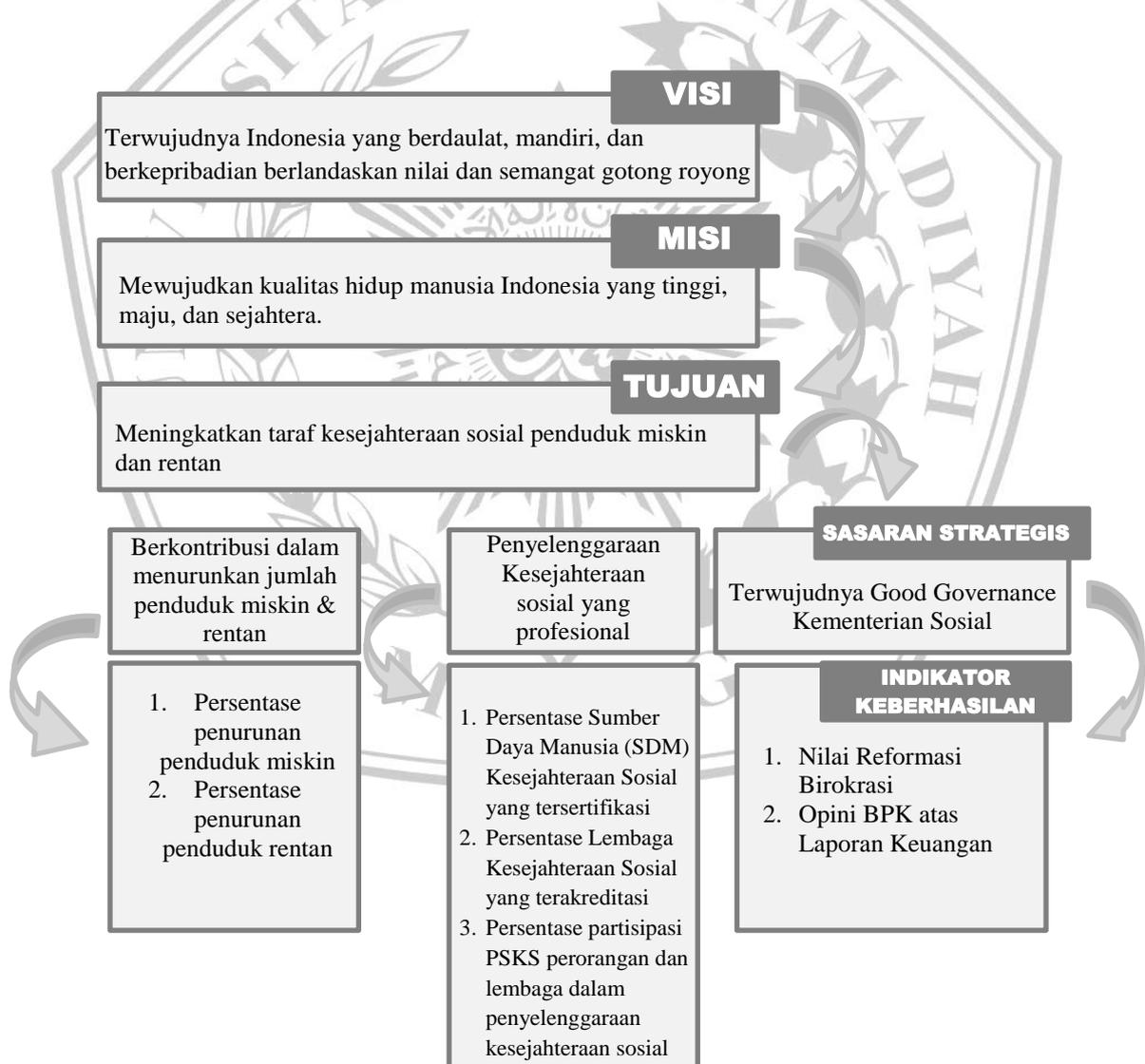
Pengawasan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial dilakukan secara ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang berlaku. Selain itu, edukasi, pembinaan, riset, dan upaya

perbaikan kualitas hidup masyarakat menjadi fokus, dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Terakhir, melalui sokongan konkrit bagi semua elemen di dalamnya, Kementerian Sosial berkomitmen untuk memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan sosial, menciptakan dampak positif yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.2.2 Visi dan Misi

Pada tahun 2020, Kementerian Sosial Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020 mengenai Rencana Taktis Kementerian Sosial untuk periode tahun 2020-2024, seperti berikut:

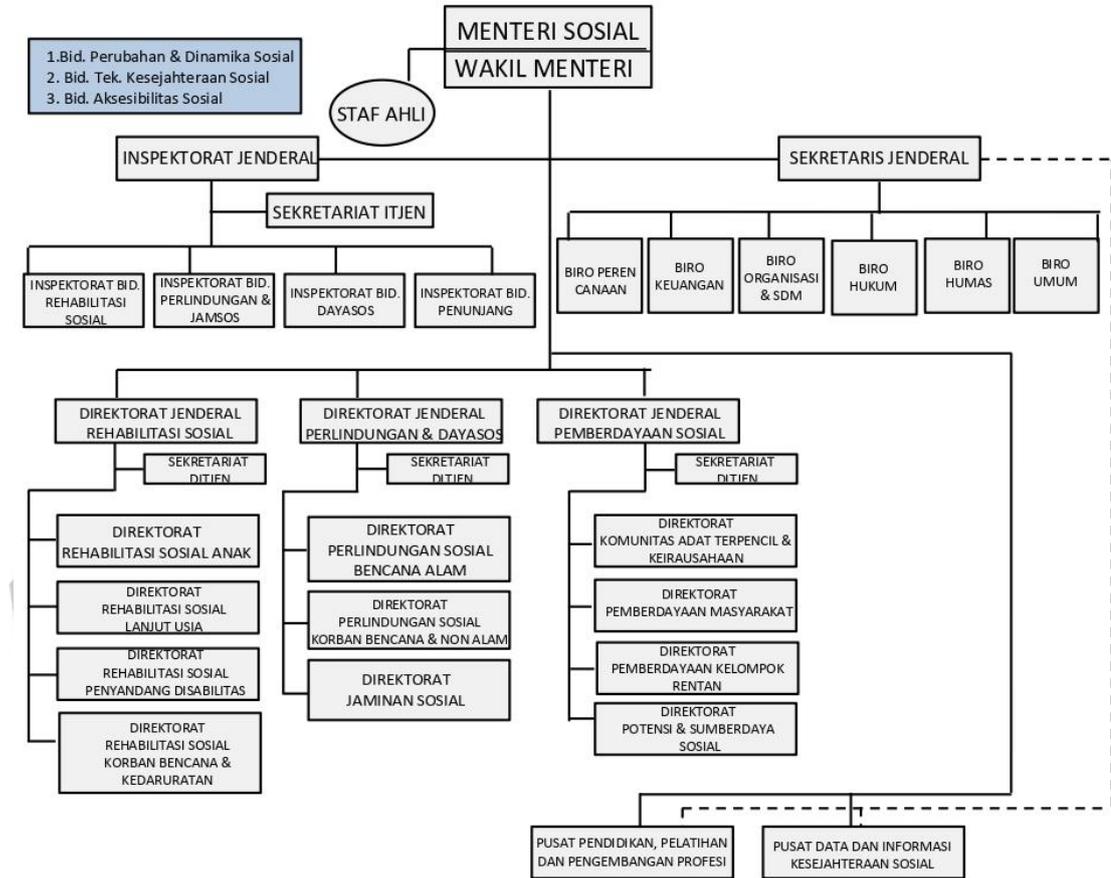
Gambar 3.4 Visi dan misi Kementerian Sosial RI



Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2023

3.2.3 Struktur Organisasi Kementerian Sosial RI

Gambar 3.5 Struktur Organisasi Kementerian RI (PERPRES NO 110 Tahun 2021)



Sumber: Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2023

3.2.4 Gambaran Umum Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial

3.2.4.1 Tugas

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3.2.4.2 Fungsi

Dalam menjalankan peran kritisnya, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial mengejar serangkaian tindakan yang mencakup seluruh spektrum perumusan dan pelaksanaan kebijakan hingga

administrasi yang efektif. Dalam perjalanannya, Direktorat Jenderal ini memainkan peran utama dalam mencapai tujuan pemberdayaan sosial. Pertama-tama, direksi ini secara aktif terlibat dalam perumusan kebijakan pemberdayaan sosial. Ini melibatkan proses identifikasi isu-isu kunci, pengembangan tujuan strategis, dan perancangan langkah-langkah kebijakan yang relevan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat. Setelah kebijakan dirumuskan, Direktorat Jenderal bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Ini melibatkan pengorganisasian dan pelaksanaan berbagai program pemberdayaan yang dirancang untuk memberikan dukungan nyata kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk memastikan konsistensi dan efektivitas dalam pelaksanaan, Direktorat Jenderal juga terlibat dalam penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial. Langkah ini dimaksudkan untuk menciptakan landasan operasional yang jelas dan dapat diukur. Sebagai upaya pendukung, Direktorat Jenderal memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan sosial.

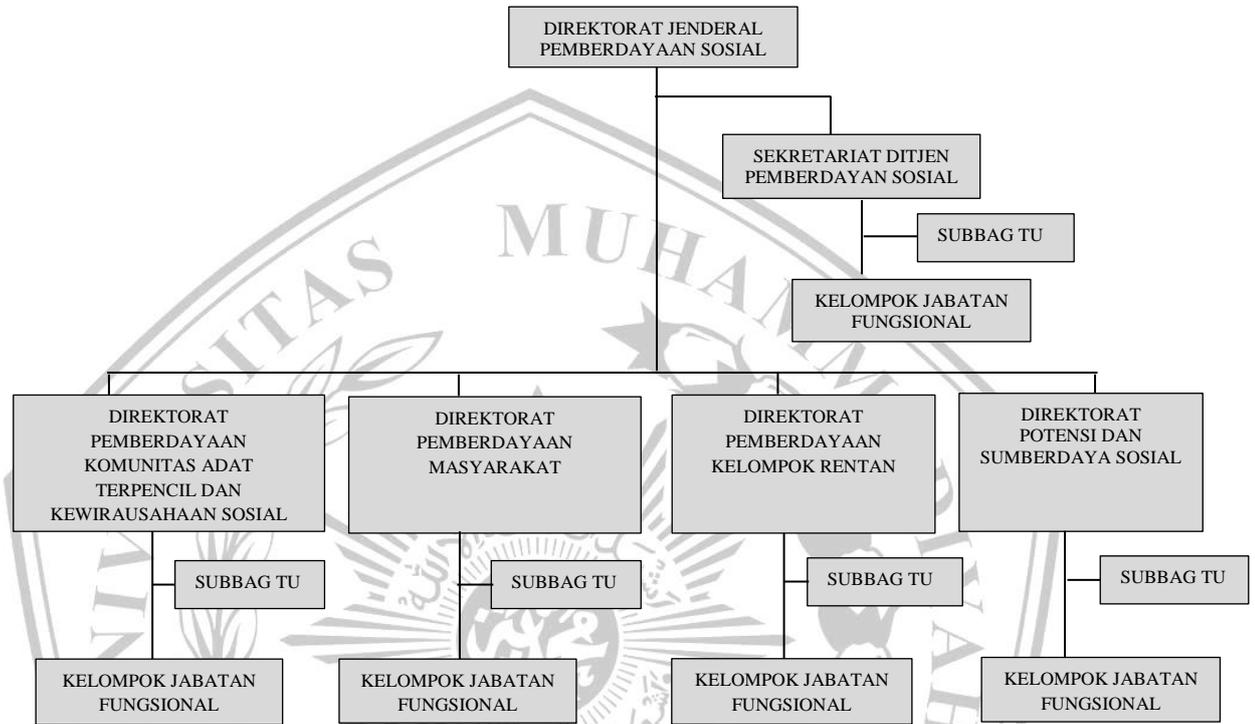
Pemantauan yang cermat dan pendampingan aktif diberikan untuk memastikan kebijakan dan program dijalankan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Proses evaluasi rutin menjadi bagian integral dari langkah-langkah ini. Direktorat Jenderal melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan berkala untuk mengukur dampak dan efektivitas kebijakan serta program pemberdayaan sosial. Tidak hanya terbatas pada aspek kebijakan dan program, Direktorat Jenderal juga bertanggung jawab atas administrasi yang baik. Ini mencakup manajemen sumber daya manusia, anggaran, dan aset yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial.

Terakhir, sebagai bentuk tanggapan yang dinamis terhadap perubahan kontekstual, Direktorat Jenderal bersedia melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri, menunjukkan fleksibilitasnya dalam beradaptasi dengan dinamika tugas dan tantangan yang terus berkembang. Melalui rangkaian inisiatif ini, Direktorat Jenderal

Pemberdayaan Sosial terus berkomitmen untuk menciptakan dampak positif dan berkelanjutan pada kesejahteraan masyarakat.

3.2.5 Gambaran Umum Organisasi Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial (Permensos 1 tahun 2022)

Gambar 3.6 Struktur Organisasi Direktorat PKAT-KS (Permensos 1 tahun 2022)



Sumber: Direktorat PKAT-KS Kemensos Tahun 2023

3.2.5.1 Tugas

Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan komunitas adat terpencil dan kewirausahaan sosial.

3.2.5.2 Fungsi

Dalam rangka mengembangkan pemberdayaan komunitas adat terpencil dan kewirausahaan sosial, Direktorat Jenderal telah melibatkan diri dalam sejumlah langkah strategis. Pertama-tama, fokus diberikan pada penyiapan perumusan kebijakan yang

berlandaskan pada pemberdayaan komunitas adat terpencil dan pengembangan kewirausahaan sosial. Langkah ini mencakup identifikasi isu-isu kunci, penetapan tujuan strategis, dan pengembangan kebijakan yang dapat memberikan dukungan yang efektif kepada komunitas tersebut.

Selanjutnya, perhatian ditujukan pada penyiapan pelaksanaan kebijakan, dengan merinci langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan komunitas adat terpencil dan kewirausahaan sosial. Proses ini mencakup pengorganisasian dan pelaksanaan program-program yang dirancang untuk memberikan dukungan yang tepat kepada komunitas adat dan mengembangkan potensi kewirausahaan sosial. Dalam konteks pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria, Direktorat Jenderal secara aktif terlibat dalam penyiapan kerangka operasional yang jelas dan terukur. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pedoman yang konsisten dan efektif dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan komunitas adat terpencil dan kewirausahaan sosial. Selanjutnya, fokus diberikan pada penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan komunitas adat terpencil dan kewirausahaan sosial. Ini melibatkan pendampingan dan pemantauan yang berkelanjutan untuk memastikan implementasi kebijakan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sekaligus memberikan dukungan teknis yang diperlukan.

Proses pemantauan, evaluasi, dan pelaporan menjadi elemen penting dalam peningkatan keberlanjutan dan efektivitas program. Direktorat Jenderal secara berkala melakukan pemantauan, mengevaluasi dampak, dan menyusun laporan terkait pelaksanaan kebijakan pemberdayaan komunitas adat terpencil dan kewirausahaan sosial. Terakhir, dalam mendukung semua upaya tersebut, Direktorat Jenderal melaksanakan urusan tata usaha dengan seksama. Ini mencakup manajemen sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, dan administrasi umum yang mendukung kelancaran kegiatan dan

pelaksanaan kebijakan. Dengan cara ini, Direktorat Jenderal berperan sebagai pihak yang proaktif dan berkomitmen dalam mewujudkan pemberdayaan komunitas adat terpencil dan pengembangan kewirausahaan sosial.

